

**RELEVANSI IMPLEMENTASI STANDAR EITI TRANSPARANSI  
BUMN, PEMBAYARAN SOSIAL, PEMBAYARAN DAN  
TRANSFER DAERAH DALAM KERANGKA KONSOLIDASI  
FISKAL DAERAH**

**Miftah Adhi Ikhsanto  
The Asia Pacific Knowledge Hub on Extractive Industries  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada**

**Semiloka Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan  
Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia  
Bandung, 12 November 2014**

# Desentralisasi

Desentralisasi fungsi  
(kewenangan / urusan)

Diikuti oleh

Desentralisasi Fiskal  
(keuangan)

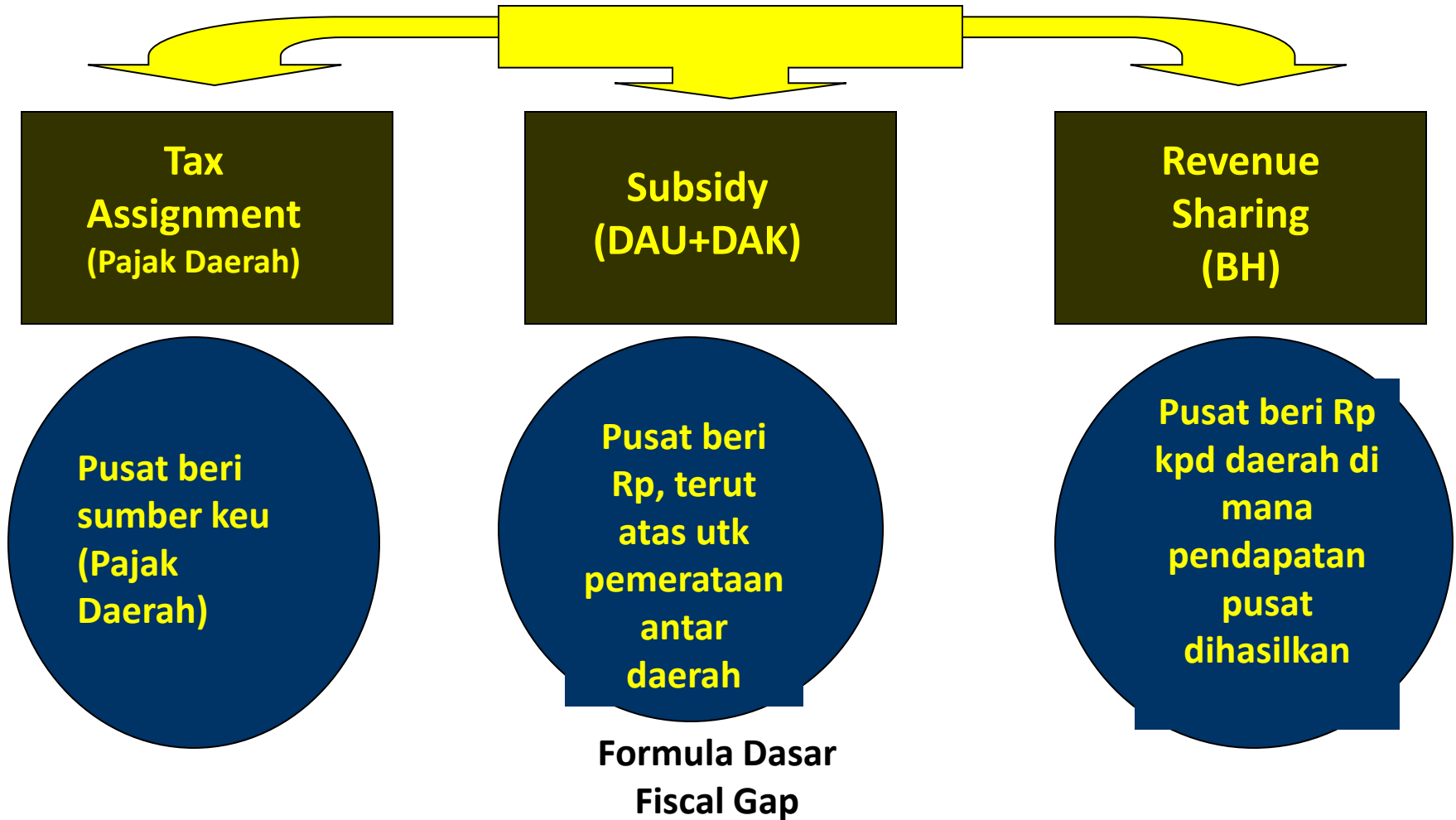
*Money follows function.*

# Money follows functions

## **Desentralisasi fungsi diikuti desentralisasi fiskal.**

- Semakin banyak fungsi yg didesentralisasikan, semakin banyak uang yg didesentralisasikan.
  - Keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal balance) terjadi apabila distribusi kapasitas fiskal setara dg distribusi kapasitas fungsi.
- 
- Apabila kapasitas fiskal lebih berada di pusat, maka pusat wajib mendesentralisasikannya (→ desentralisasi fiskal)

# Jenis DESENTRALISASI FISKAL



# Kebijakan Bagi Hasil di Indonesia (dalam persentase)

No.	Jenis Penerimaan	Sebelum UU-PKPD				Sesudah UU-PKPD					UU Otonomi Khusus	
		Pusat	Dati I	Dati II		Pusat	Prov	Kab/ Kota	Pemerat. Kab/Kota Lainnya		NAD	Papua
1	PBB	10	16,2	64,8		-	16,2	64,8(+)	+		90	90
2	BPHTB	20	16	64		-	16	64 (+)	+		80	80
3	IHH	55	30	15		20	16	64	-		80	80
4	PSDH	55	30	15		20	16	32	32		80	80
5	Landrent/luran Tetap	20	16	64		20	16	64	-		80	80
6	Royalti Pertambangan Umum	20	16	64		20	16	32	32		80	80
7	Perikanan	100	-	-		20	-	-	80		80	80
8	Minyak	100	-	-		85	3	6	6		70	70
9	Gas Alam	100	-	-		70	6	12	12		70	70
10	Dana Reboisasi	100	-	-		60	-	40	-		40	40
11	PPh	100	-	-		80	8	12	-		20	20

# Implikasi Bagi Hasil

- Memperbaiki kepercayaan politik antara pusat dg daerah di mana hasil diperoleh.
  - Meningkatkan rasa memiliki masy daerah thd sumber daya ybs.
- 
- Tidak membantu perbaikan, malahan bisa memperburuk, horizontal fiscal imbalance.
  - Dorong konflik perbatasan antar daerah.
  - Dorong minat pemekaran daerah.

# **PROBLEMA PENGELOLAAN BAGI HASIL DI DAERAH**

- Informasi yang asimetris tentang besaran transfer bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah sehingga mengganggu konsolidasi fiskal daerah untuk percepatan pembangunan.
- Formula bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum merespons kebutuhan fiskal di daerah.
- Formula bagi hasil antar pemerintah daerah belum merespons eksternalitas negatif yang dimunculkan dari kegiatan pertambangan.

# KONTRIBUSI IMPLEMENTASI STANDAR EITI TRANSPARANSI

1. Memperbaiki kepercayaan publik dan integrasi nasional
2. Membangun infrastruktur:
  - a. Politik: demokrasi; partisipasi; stabilitas pol;
  - b. Ekonomi: jamin saving & investasi; kendalikan inflasi & debt; stabilisasi moneter; dll
  - c. Hukum: kepastian hukum
3. Pemerataan antar daerah
4. Standarisasi pelayanan
5. Pelayanan lintas daerah



# APBD

- Perumusan Kebij
- Pengelolaan

## TRANSFER PUSAT:

- Subsidi
- Bagi Hasil

## PENDAPATAN

### P A D:

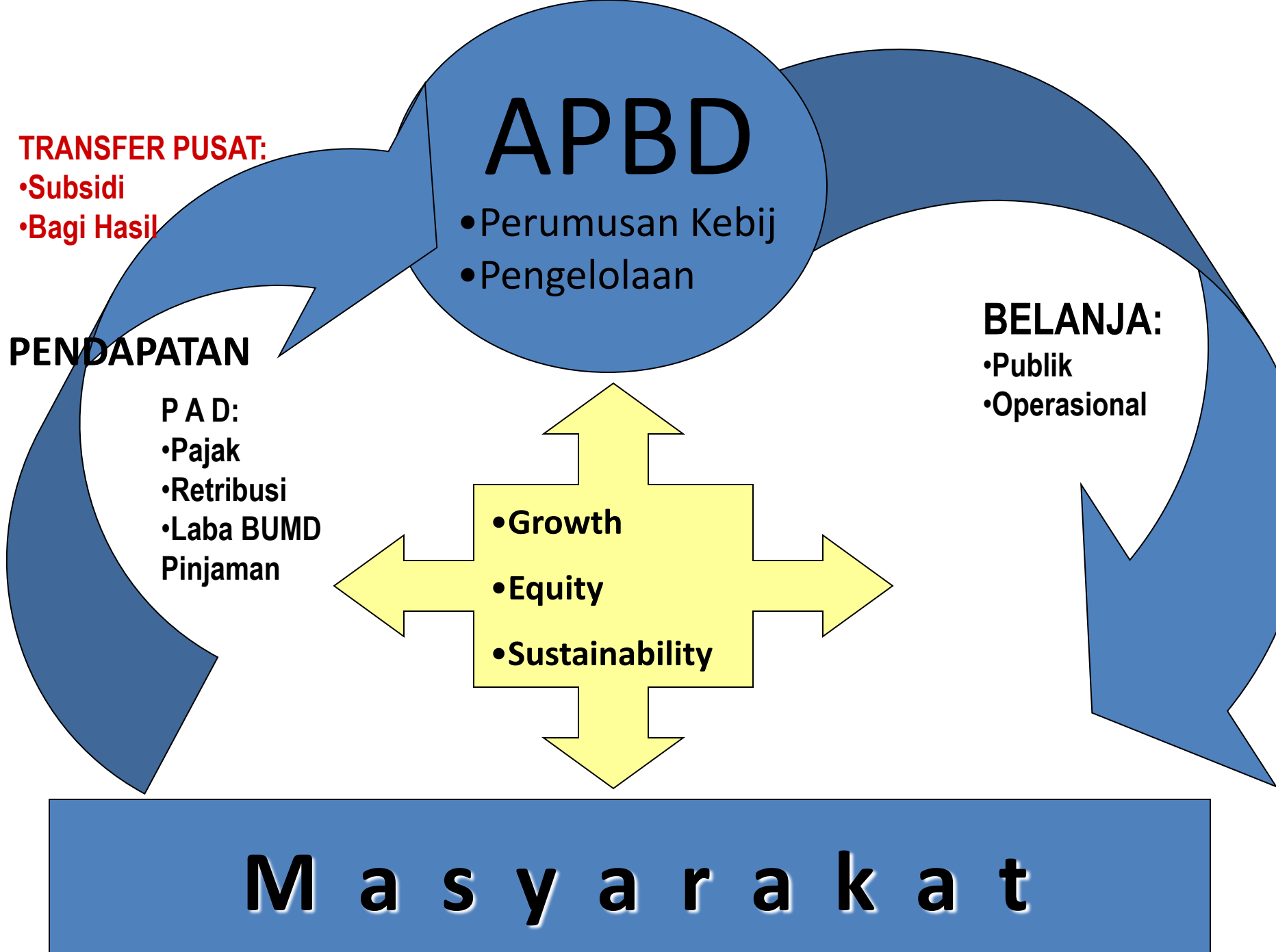
- Pajak
- Retribusi
- Laba BUMD
- Pinjaman

## BELANJA:

- Publik
- Operasional

- Growth
- Equity
- Sustainability

**M a s y a r a k a t**



A photograph of two young children standing in a lush green rice field. They are holding up two Indonesian flags (red and white) on long poles. The child on the left is wearing a blue shirt, and the child on the right is wearing a patterned shirt. In the background, there are green hills and trees. The text "Sekian dan Terimakasih..." is overlaid in white at the bottom of the image.

Sekian dan Terimakasih...